

## **MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH TSANAWIAH AL-YASINI PASURUAN**

Ja'far<sup>1</sup>, M. Syaikhudin<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan

[sbgjakfar86@gmail.com](mailto:sbgjakfar86@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang manajemen keuangan madrasah di MTs Al-YasiniPasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; sumber-sumber keuangan MTs Al-YasiniPasuruan ada tiga yang pertama dari pemerintah kedua dari komite dan ketiga dari orang tua. Perencanaan keuangan di MTs Al yasini yaitu mengadakan rapat membahas RKAM( rencana kerja anggaran madrasah) dengan terlebih dahulu mengetahui jumlah dana dan juga kebutuhan apa saja atau bisa disebut pelaporan keuangan dengan sistem online, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, lalu bendahara sekolah, pengelola, komite bersama perwakilan Yayasan (stek holder madrasah). Setiap enam bulan sekali di MTs Al-YasiniPasuruan diadakan audit online. Audit juga dilakukan untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independent. Jika laporannya salah maka tidak bisa diterima atau ditolak dan itu menyebabkan dana selanjutnya tidak bisa turun atau cair, selanjutnya ada audit dari kemenag yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, dan ada juga audit dari Yayasan.

**Kata Kunci:** *Manajemen, Keuangan, Madrasah*

### **PENDAHULUAN**

Konsep pembiayaan merupakan bagian dari manajemen pendidikan, karena keberlangsungan pendidikan dapat diselenggarakan karena adanya pembiayaan yang menunjang terhadap pelaksanaan pendidikan di madrasah. Pendidikan dan pembiayaan tak dapat dipisahkan, karena untuk mengelola sebuah pendidikan dibutuhkan pembiayaan dan ketenagakerjaan

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga pembiayaan dan ketenagakerjaan merupakan kebutuhan yang primer sehingga pembiayaan dan pengalokasian harus betul-betul ditempatkan dengan baik (Nurodin & Minhajul K, 2019).

Menurut Hasbullah, persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.<sup>2</sup> Proses penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah atau madrasah akan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang baik. Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain (Noval & Irawan, 2019). Dan merupakan salah satu hal penting dalam suatu organisasi baik pemerintah maupun perusahaan adalah anggaran karena sangat membantu manajemen dalam melakukan perencanaan, pengatur dan pengevaluasian jalannya suatu kegiatan yang telah direncanakan. Ada perbedaan antara anggaran yang ada di perusahaan dengan anggaran yang ada di pemerintahan, dimana anggaran di perusahaan tidak dipublikasikan kepada masyarakat atau bersifat rahasia. Sedangkan anggaran yang ada di pemerintahan, harus diinformasikan secara jelas dan konkrit kepada masyarakat agar dapat dipantau dan dikritisi karena dana merupakan dana dari masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan tersebut (Ayu, 2020).

Salah satu elemen penting dalam mutu pendidikan adalah pembiayaan. Pembiayaan kadang juga merupakan inti dari setiap permasalahan pendidikan, apalagi jika dihubungkan dengan Pembiayaan pendidikan pada swasta yang seluruhnya bersumber dari dana masyarakat walaupun sebenarnya ada bantuan dari pemerintah tetapi tidak terlalu signifikan untuk dibuat acuan dalam penentuan kebijakan maka kualitas pendidikan tinggi swasta tentu sangat

bergantung pada bagaimana manajemen pembiayaannya. Manajemen Pembiayaan yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah lembaga pendidikan untuk memajukan atau meningkatkan kualitasnya (Waliyah et al., 2021).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Keuangan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaikbaiknya. Agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sehingga dalam hal pengelolaan perlu dilakukan manajemen keuangan yang baik (Nafisah & Sakitri, 2017).

Pendanaan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder sekolah. Pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi untuk memandu segala sumber daya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Nurdiyanti, n.d.). Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (PP RI SNP). Pada bab IX pasal 62 dari PP disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Maka agar penyelenggaraan di madrasah dapat berjalan dengan baik harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan madrasah dalam menyediakan dana di khawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan untuk itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam

pembiayaan pendidikan agar terselenggara dengan baik. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Musolin et al., 2021).

Dalam sistem pendidikan Indonesia, pembiayaan pendidikan merupakan elemen strategis yang akan menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kualitas praktik pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagian pembiayaan pendidikan. Biaya digunakan untuk menyediakan Gedung sekolah atau kampus dan fasilitas lainnya, untuk membayar guru atau dosen, untuk menyediakan kursus dan layanan lainnya. Salah satunya perguruan tinggi dalam pembangkitan sumber daya yang mumpuni di bidang manajemen. Karena pendidikan tidak lepas dari penggunaan dana atau pengeluaran biaya tersebut agar dapat dialokasikan sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan (Setiawan et al., 2021). Pengelolaan pembiayaan yang terorganisir di sebuah lembaga pendidikan terutama madrasah akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan mendukung tercapainya tujuan madrasah (Sopwandin, n.d.).

Manajemen pembiayaan dalam pendidikan memberikan kekuatan dalam menunjang kelancaran pembelajaran siswa, karena di dalam kegiatan manajemen seluruh kegiatan pengelolaan diperhatikan dan diawasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Manajemen pembiayaan tak lepas dari aspek perencanaan, maupun implementasi dan evaluasi pendidikan. Sehingga ekonomi dan pendidikan tak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi (Nurodin & Minhajul K, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Manajemen keuangan pendidikan memberikan atensi yang besar akan pentingnya tata kelola keuangan pendidikan dalam peningkatan program sekolah, pelaksanaan guru dalam kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan akademis peserta didik (Pusvitasari & Sukur, 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang sumber-sumber keuangan, perencanaan anggaran, pengalokasian anggaran MTs Al-Yasini Pasuruan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong Lexy J, 2025). Kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris Herdiansyah, 2012). Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses sistematis manajemen pembiayaan di MTs Al-Yasini Pasuruan yang terdiri dari sumber-sumber dana, perencanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang bersumber dari pegawai bagian bendahara madrasah. Observasi terkait dengan manajemen pembiayaan dan dokumentasi terkait dengan pencatatan keuangan di MTs Al-Yasini Pasuruan.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti di lapangan, maka diperoleh temuan tentang manajemen keuangan yang diimplementasikan pada MTs Al-Yasini Pasuruan sebagai berikut;

#### **1. Sumber-sumber Keuangan Madrasah**

Sumber keuangan MTs Al-Yasini Pasuruan dari APBN (anggaran pemerintah) yang biasanya disebut BOS, dan komite dari orang tua siswa. Sumber dana yang dari pemerintah terdiri dari BOS yang diterima secara rutin oleh madrasah setiap periode tertentu serta bantuan lain yang sifatnya

tidak tetap (Noval & Irawan, 2019). Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah. Seperti halnya madrasah Negeri ataupun swasta memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat serta orang tua siswa. Menurut UU No 20 tahun 2003 pasal 47 Tentang Sumber Pendanaan Pendidikan yaitu; Ayat (1) sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Ayat (2) pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ayat (3) ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Musolin et al., 2021).

Pembiayaan awal madrasah berawal dari pimpinan yayasan, dana selanjutnya di peroleh melalui Bantuan Operasional Madrasah (BOM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi. (Sopwandin, n.d.) Pada sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, donatur, subsidi pemerintah, yayasan, dan masyarakat secara luas (Siregar & Saputra, n.d.). Selanjutnya menurut Sulistyorinisebagaimana dikutip Sonedidkk bahwa sumber pembiayaan atau sumber keuangan sekolah/madrasah secara garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga sumber yaitu :

- a. Pemerintah, baik pusat atau daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
- b. Orang tua Peserta didik.
- c. Masyarakat, baik mengikat atau tidak (Musolin et al., 2021).

Masing-masing sumber tersebut adalah pos strategis dalam sirkulasi pembiayaan pendidikan untuk menopang program pendidikan yang diagendakan, baik oleh pihak lembaga pendidikan sendiri sebagai wadah

pemberdayaan dan pengembangan, maupun pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kebijakan dalam penganggaran yang secara institusional memiliki tanggung jawab utama dan pendorong ke arah efektivitas dan efisiensi aktivitas pendidikan. Oleh karena demikian, faktor biaya adalah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan (Waliyah et al., 2021).

## **2. Perencanaan Keuangan Madrasah**

Perencanaan keuangan di Mts Al yasini yaitu mengadakan rapat membahas RKAM( rencana kerja anggaran madrasah) atau bisa disebut pelaporan keuangan dengan sistem online, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, lalu bendahara sekolah, pengelola, komite bersama perwakilan Yayasan (stek holder madrasah)

Penyusunan anggaran sangat penting dalam bidang pendidikan karena anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka uang yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau kesepakatan antara puncak pemimpin dengan pemimpin di bawahnya dalam menentukan besarnya biaya alokasi suatu penganggaran (Musolin et al., 2021).Perencanaan pembiayaan harus dipublikasikan secara transparansi agar orangtua siswa serta masyarakat mengetahui arah penyaluran pembiayaan pendidikan madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan (Nurodin & Minhajul K, 2019).

Penyusunan anggaran merupakan gambaran setiap kegiatan yang direncanakan sekolah agar dapat menentukan satuan biaya di setiap kegiatan sehingga membantu dalam mengarahkan lembaga pendidikan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Adapun fungsi anggaran diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu; Pertama, alat penafsir, yaitu memperkirakan besarnya pengeluaran dan pendapatan sehingga mengetahui kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam realisasi kegiatan di lembaga pendidikan. Kedua, alat

kewenangan, yaitu memberi kewenangan terkait dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sesuai perencanaan anggaran. Ketiga, alat efisiensi, yaitu mengetahui kegiatan pendidikan yang dilaksanakan sesuai perencanaan anggaran secara efisien (Pusvitasari & Sukur, 2020).

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) dibuat terlebih dahulu oleh Kepala Madrasah bersama Wakamad dengan memperkirakan dana yang akan diterima orang tua siswa. Setelah itu baru dimusyawarahkan dengan pihak Yayasan dan Komite Madrasah. Hal ini memudahkan nantinya pada saat musyawarah sudah ada acuan, tinggal menerima masukan dan saran dari pihak Yayasan dan Komite. Semua pihak merasa dilibatkan dan bertanggung jawab terhadap rencana dan program madrasah (Siregar & Saputra, n.d.). Sebelum menyusun RAPBM, pihak sekolah harus mengidentifikasi apa saja yang menjadi sumber penerimaan sekolah. Proses ini menjadi penting untuk mengetahui apakah penerimaan tersebut sudah bisa mencukupi pembiayaan pendidikan atau sekolah perlu mencari sumber penerimaan lainnya. Sumber-sumber pendapatan yang telah diidentifikasi kemudian dihitung dan diperkirakan besarnya (Nafisah & Sakitri, 2017).

Menurut Garner merumuskan siklus perencanaan pembiayaan yang strategis sebagai berikut: 1) misi (*mission*), 2) tujuan jangka panjang (*goals*), 3) tujuan jangka pendek (*objectives*), 4) program, layanan, aktivitas (*programs, services, activities*), tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek berdasarkan kondisi riil unit sekolah (*site-based unitgoals & objectives*), 5) target: baik outcomes maupun outputs, 6) anggaran (*budget*), dan 7) perencanaan pembiayaan yang strategis (*strategic financial plan*) (Waliyah et al., 2021).

Perencanaan dalam manajemen pembiayaan ini adalah Budgeting. Budgeting yang dilaksanakan di Madrasah menggunakan anggaran desain Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA) atau Sistem Perencanaan,

Penyusunan Program dan Perencanaan (SP4) sebagai modifikasi dari Planning Programming and Budgeting System (PPBS).(Sopwandin, n.d.)

Perencanaan keuangan sekolah mengacu pada konsep penyelenggaraan pendidikan sekolah secara utuh. Pelayanan di lembaga pendidikan di antaranya; (1) teknik layanan edukatif dalam proses kegiatan belajar mengajar baik secara teori maupun praktik dan penilaian hasil belajar, (2) layanan yang menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler dan intra kurikuler, (3) pemeliharaan dan pemanfaatan buku pelajaran, alat pendidikan, alat pelajaran, laboratorium, perpustakaan dan peralatan praktik serta bahan praktik dan keterampilan, (4) pengadaan dan perawatan sarana penunjang seperti sarana administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah dan lingkungan; (5) penyediaan daya dan jasa, (6) perjalanan dinas kepala madrasah dan guru, (7) pemberdayaan komite madrasah, kegiatan sosial, dan layanan kemasyarakatan (8) kegiatan lomba yang diikuti peserta didik atau guru, (9) keperluan layanan sekolah yang habis pakai seperti surat kabar, (10) honorarium pendidik dan tenaga kependidikan, asuransi kesehatan, transportasi, dan lain-lain (Pusvitasari & Sukur, 2020).

Proses Budgeting dapat dilakukan atas dasar enam faktor: a) penyusunan RAPBS/M atau nama lainnya RKAM dilakukan oleh tim, b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, c) penyusunan RAPBS/ RKAM didasarkan atas analisis kebutuhan, d) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, e) sumber dana yang variatif, dan f) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan.(Sopwandin, n.d.)

Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran seperti; a) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang. b) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial. c) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang sudah disetujui oleh

instansi. d) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan yang berwenang. e) Melakukan revisi anggaran. f) Persetujuan revisi anggaran. g) pengesahan anggaran” (Musolin et al., 2021).

### **3. Pertanggungjawaban keuangan Madrasah.**

Setiap enam bulan sekali di MTs Al-YasiniPasuruan diadakan audit online. Audit adalah pemeriksaan terperinci terhadap sistem, laporan, atau identitas yang ada. Audit dilakukan untuk memastikan suatu departemen dalam organisasi atau perusahaan sudah mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Audit juga dilakukan untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independent. Jika laporannya salah maka tidak bisa diterima atau ditolak dan itu menyebabkan dana selanjutnya tidak bisa turun atau cair, selanjutnya ada audit dari kemenag yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, dan ada juga audit dari Yayasan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban ini juga bagian dari pengawasan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan. Hal ini dilakukan mulai dari proses pengeluaran, pos anggaran pembelanjaan, perhitungan dan penyimpangan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara periodik perlu adanya akuntabilitas laporan tahunan dan laporan masa akhir jabatan pimpinan kepada *stakeholder* (Pusvitasari & Sukur, 2020). *Auditing* di Madrasah terbagi ke dalam tiga sesi, yaitu: Pertama, setiap tiga bulan sekali, *auditing* dilakukan oleh kepala madrasah sebagai bentuk *controlling* dan *monitoring* keuangan madrasah. Kedua, setiap satu semester sekali, ini sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah seperti dana BOS, BPMU, BOM dan bantuan-bantuan lainnya. Ketiga, dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu *auditing* RKAM dan seluruh kegiatan manajemen pembiayaan madrasah, dalam kegiatan *auditing* RKAM ini biasanya diadakan rapat pleno yang peserta rapatnya adalah: kepala

madrasah, wakil kepala madrasah, komite madrasah, guru-guru, staff TU dan ketua yayasan (Sopwandin, n.d.).

Pertanggungjawaban keuangan sekolah sebagai sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran dan pemakaian biaya (Pusvitasari & Sukur, 2020). Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah berisi laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana, dan penggunaan dana secara keseluruhan selama satu tahun anggaran (Nafisah & Sakitri, 2017). Aliran uang tersebut mencakup pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang (Waliyah et al., 2021). Dengan demikian laporan per tanggung jawaban disampaikan ke beberapa pihak yaitu pemerintah, ketua Yayasan dan komite sebagai wujud keterbukaan anggaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan, sumber-sumber keuangan MTs Al-Yasini Pasuruan ada tiga yang pertama dari pemerintah kedua dari komite dan ketiga dari orang tua. Perencanaan keuangan di MTs Al-Yasini yaitu mengadakan rapat membahas RKAM( rencana kerja anggaran madrasah) dengan terlebih dahulu mengetahui jumlah dana dan juga kebutuhan apa saja atau bisa disebut pelaporan keuangan dengan sistem online, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, lalu bendahara sekolah, pengelola, komite bersama perwakilan Yayasan (stakeholder madrasah). Setiap enam bulan sekali di MTs Al-Yasini Pasuruan diadakan audit online. Audit juga dilakukan untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independent. Jika laporannya

salah maka tidak bisa diterima atau ditolak dan itu menyebabkan dana selanjutnya tidak bisa turun atau cair, selanjutnya ada audit dari kemenag yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, dan ada juga audit dari Yayasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu, E. F. (2020). EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) DURIAN TARUNG PADANG. 2(4).
- Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Musolin, M., Khoirun Nisa', & Laelatul Mudmiroh. (2021). Implementasi Manajemen Pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo. AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(2), 147-166. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.175>
- Nafisah, D., & Sakitri, W. (2017). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH.
- Noval, A., & Irawan, I. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta: Studi kasus di MTs. Wihdatul Fikri Kab. Bandung. Manajemen Pendidikan, 14(1), 73-81. <https://doi.org/10.23917/jmp.v14i1.7051>
- Nurdiyanti, Y. (n.d.). Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah Terhadap Efisiensi Biaya Pendidikan.
- Nurodin, A., & Minhajul K, I. (2019). IMPLIKASI PERAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN MADRASAH TERHADAP KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KEAGAMAAN MTs. AS-SAWIYAH KAB. BANDUNG. Jurnal Isema : Islamic Educational Management, 4(2), 267-276. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i2.5566>
- Pusvitasari, R., & Sukur, M. (2020). MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH DALAM PEMENUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN (Studi kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo). AL-TANZIM: Jurnal Manajemen

Pendidikan Islam, 4(1), 94–106. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.959>

Setiawan, A. S., Basuki, I., & Roesminingsih, E. (2021). Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. 7(3).

Siregar, M. F. S., & Saputra, I. B. (n.d.). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH AL-MANAR KECAMATAN MEDAN JOHOR.

Sopwandin, I. (n.d.). MANAJEMEN PEMBIAYAAN MADRASAH MADRASA FINANCING MANAGEMENT.

Waliyah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management, 1(1), 77–98. <https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.272>